

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Selama periode penelitian rata-rata dinamika kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jambi hampir sebagian besar masih dikategorikan kurang mandiri dengan kemandirian fiskal dibawah 10%. Hanya dua kabupaten dan provinsi yang kemandiriannya diatas 10%, yaitu kabupaten Bungo dengan kategori kurang, Kota Jambi dengan kategori cukup, dan Provinsi Jambi dengan kategori sedang. Perkembangan Investasi di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan tiap tahun. Rata-rata Indeks zakat nasional di Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan tiap tahun dan kinerjanya semakin baik. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi menurun tajam pada tahun 2020 akibat pandemic covid-19, namun pada tahun 2021 dan 2022 meningkat kembali setelah adanya *recovery* oleh pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Islamic Human Development Index* di Provinsi Jambi selama periode 2107 – 2022 dalam kategori sedang dan rendah, dimana kabupaten yang masuk dalam kategori rendah adalah kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tebo, Bungo, Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Sedangkan yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjab Timur dan Kota Jambi.
2. Secara simultan variabel Kemandirian fiskal, investasi dan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara parsial ditemukan bahwa Kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya kemandirian fiskal belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika sumber daya lokal sangat terbatas dan tidak cukup mendukung investasi atas infrastruktur yang dibutuhkan, disamping itu masih besarnya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat yang seringkali belum mampu untuk mengelolanya secara baik serta sangat rawan korupsi. Namun sebaliknya, untuk investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi

3. investasi Provinsi Jambi, semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, begitu pula dengan zakat, semakin meningkat indeks zakat nasional Provinsi Jambi maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
4. Secara simultan variabel Kemandirian fiskal, investasi, zakat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Human Development Index* (IHDI). Sedangkan secara parsial Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHDI, artinya Investasi terutama Foreign Direct Investment (FDI) seringkali tertarik hanya pada pengembalian modal dan profitabilitas daripada pada dampak sosial seperti pada akses pendidikan dan kesehatan dan beberapa kasus dinegara-negara dengan struktur social yang rapuh dan rawan korupsi investasi bisa menimbulkan meningkatnya ketimpangan social daripada mengurangnya. Namun sebaliknya, kemandirian fiskal, zakat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHDI. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal Provinsi Jambi, maka semakin meningkat pula IHDI Provinsi Jambi, begitu juga dengan zakat, semakin meningkat indeks zakat nasional Provinsi Jambi maka semakin meningkat IHDI Provinsi Jambi, dan yang terakhir semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat pula IHDI Provinsi Jambi.
5. Pengaruh Kemandirian fiskal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi terhadap IHDI tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi variabel kemandirian fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya jika kemandirian fiskalnya belum mampu dalam membiayai pembangunan secara keseluruhan maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Tetapi untuk variabel investasi dan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap IHDI melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

6.2. Saran

6.2.1. Saran bagi Pembuat Kebijakan

1. Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah daerah harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kesadaran dalam

pembayaran pajak, berikan penekanan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar untuk menunjang pembangunan daerah serta penegakkan hukum yang tegas jika masyarakat tidak mau membayar pajak ada sanksi yang akan diberikan. Pemanfaatan teknologi Informasi juga perlu ditingkatkan, yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran cukup untuk ini sehingga dengan teknologi informasi yang mumpuni petugas pungut dapat menjangkau daerah terluar dalam upaya mengoptimalkan pungutan pajak.

2. Aktif dalam mengandeng investor dalam upaya meningkatkan investasi dan terbitkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor dalam pengurusan perizinan, namun ada timbal baliknya pemerintah daerah juga membuat aturan agar investor lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing, sharing ilmu pengetahuan dan transfer teknologi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dalam bekerja.
3. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong masyarakat untuk segera membayar zakat, seperti aturan dalam memungut zakat pada pegawai pemerintah tidak hanya dari gaji tapi juga pendapatan lainnya seperti Tunjangan Penghasilan pegawai (TPP), selanjutnya Pemerintah daerah dapat menerbitkan surat edaran untuk mendorong organisasi pemungut zakat dalam meningkatkan pembayaran zakat dan mendistribusikannya dalam bentuk zakat produktif kepada masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, selanjutnya pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada organisasi yang terbaik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut, dengan demikian petugas pemungut menjadi termotivasi dan bersemangat dalam bekerja dan mengumpulkan zakat.
4. Agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka harus dibuat regulasi yang adil serta adanya pengawasan sehingga dapat mendukung terciptanya distribusi pendapatan, seperti regulasi yang mengharuskan adanya kemitraan para pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan diberlakukannya kuota terhadap para

pengusaha besar untuk menerima baha-bahan mentah dari pengusaha kecil, dan juga bersedia memasarkan produk masyarakat dan melakuan pembayaran yang cepat

5. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Kembangkan sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi dampak kebijakan investasi dan pengelolaan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui evaluasi yang teratur, pemerintah dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan yang ada. Serta dapat langsung mengambil tindakan dan mencari solusi jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

6.2.2 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Peneliti disarankan untuk melakukan studi di berbagai daerah dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman tentang pengaruh variabel-variabel tersebut, tetapi juga memungkinkan perbandingan yang lebih signifikan antar lokasi. Selain itu, melakukan perbandingan antar negara, khususnya di antara negara-negara dengan tingkat kemandirian fiskal dan pola investasi yang beragam, dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang berbeda di berbagai konteks.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dikarenakan ketersediaan data pada instansi terkait di masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Keterbatasan ini mengakibatkan formulasi model yang dibangun memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini terbatas pada metode pengumpulan data sekunder dan pengolahan dalam bentuk panel data (gabungan data time series dan cross section), karena data time series dalam jangka waktu yang panjang tidak tersedia secara lengkap di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi karena data tidak tersip dengan baik. Data time series yang digunakan hanya pada tahun 2017-2022.

2. Variabel yang diteliti terfokus pada : Dari aspek kemandirian fiskal hanya pada pendekatan PAD dan dana transfer saja, dan tidak mengukur dari pendekatan lainnya seperti dari sisi pengeluaran; Dari aspek ekonomi terbatas hanya pada investasi swasta dan tidak memasukkan dari sisi investasi publik. Pada aspek pertumbuhan ekonomi hanya mengukur dari sisi PDRB saja.
3. Penelitian ini terbatas pada studi regional pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sehingga tidak dapat melihat pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi, zakat, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara nasional.